

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**RENCANA KERJA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**TAHUN 2023**

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucap puji syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah kami selesaikan penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan rencana program kerja tugas dan kegiatan selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 untuk disampaikan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 ini. Sebagai wujud pelaksanaan tugas–tugas pemerintahan antara lain dengan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya dalam Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kami merasa bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangannya. namun kami telah berusaha baik dalam perencanaan, penganggaran dan indikator kinerja telah kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kami mengharapkan masukan dan saran bagi para pembaca/Instansi terkait untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Karanganyar , Agustus 2022

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN KARANGANYAR

**SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos**

Pembina TK.I

NIP. 19720620 199203 1 002

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR i**

**DAFTAR ISI ii**

**DAFTAR TABEL iii**

**DAFTAR LAMPIRAN iv**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar belakang 1
2. Landasan Hukum 6
3. Maksud dan Tujuan 9
4. Sistematika Penulisan 9

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 11**

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11
2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 25
4. Review terhadap rancangan awal RKPD 26
5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peluang 30

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN 32**

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional 32
2. Tujuan dan Sasaran Dispermades 32
3. Program dan Kegiatan 35

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 36**

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 36

**BAB V PENUTUP 44**

**DAFTAR TABEL**

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2020 12
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2021 17
3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 27
5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 30

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar 33

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 43

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara kelembagaan, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan (community based development), baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SPPD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan SKPD, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan SKPD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja SKPD juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD oleh SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja SKPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di SKPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DISPERMADES) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dispermades Kabupaten Karanganyar untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dispermades Kabupaten Karanganyar disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dispermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dispermades, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan Dispermades;
2. Organisasi dan Tugas Fungsi Dispermades;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun sebelumnya;
4. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dispermades;
5. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dispermades;
6. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dispermades;
7. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
8. Rancangan awal RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2023;
9. Informasi lain terkait pelayanan Dispermades.
10. Analisis gambaran pelayanan Dispermades;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dispermades adalah:

1. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dispermades sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
2. Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
3. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dispermades untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
4. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
5. Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Dispermades;
6. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun lalu berdasarkan Renstra Dispermades;

Review hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dispermades dan kinerja pelayanan Dispermades;
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Dispermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dispermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dispermades;
3. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Dispermades dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dispermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.
5. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dispermades.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja Dispermades terhadap pelayanan Masyarakat.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dispermades.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs
4. Tantangan, hambatan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dispermades.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
6. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program kegiatan, tolok ukur, target sasaran program kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan untuk Dispermades.

Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD
4. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dispermades.

1. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Untuk melaksanakan kegiatan Dispermades mengacu pada Renstra Perubahan Dispermades tahun 2021- 2023. Selain itu juga memperhatikan hasil musrenbang secara berjenjang yang dilaksanakan secara rutin mulai dari dusun, desa dan kecamatan diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun semua program kegiatan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang tertuang dalam RKP Desa termasuk sumber pembiayaannya baik didanai dari swadaya masyarakat maupun dari sumber dana dari pemerintah (desa/kelurahan, Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat).

1. Perumusan kegiatan prioritas;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, serta berdasarkan usulan masyarakat berupa pengajuan proposal yang telah masuk ke Dispermades untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades dalam pembangunan daerah melalui fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa.

1. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dispermades;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dispermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen. Rancangan Renja Dispermades tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan yang dibahas dalam forum SKPD kabupaten.

1. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa.

1. Penyempurnaan rancangan Renja Dispermades;

Penyempurnaan rancangan Renja Dispermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD Kabupaten.

1. Pembahasan forum SKPD;

Pembahasan dalam forum SKPD kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dispermades dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan.

1. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dispermades dengan hasil pembahasan forum SKPD.

Dokumen rancangan Renja Dispermades yang telah didiskusikan dalam forum SKPD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD.

**1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusuna Renja Dispermades adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
34. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karanganyar;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dispermades, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar No.129);
39. Peraturan Bupati Karanganyar No 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
40. Peraturan Bupati Karanganyar No 112 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
41. Peraturan Bupati Karanganyar No 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

**1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dispermades adalah sebagai pedoman bagi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam rangka merumuskan program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dispermades untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dispermades Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2023;
2. Memaparkan tujuan sasaran dan indikator hasil (Outcome) dari program dan kegiatan termasuk jumlah anggaran untuk pelaksanaan selama tahun anggaran 2023;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan pastisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya pengunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

**1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dispermades Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Dispermades

3.3. Tantangan dan Peluang Dispermades

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

A. Program, Kegitan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V PENUTUP

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

**2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuraan kinerja sasaran dari hasil yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020, 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Pada Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar melaksanakan 4 program, 4 kegiatan dan 18 sub kegiatan sesuai Nomenklatur Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan total anggaran Tahun 2021 sebesar RP.15.618.862.000,- adapun realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.15.060.752.620,- atau terserap 96,43 persen. Secara keseluruhan target indikator baik program, kegiatan maupun sub kegiatan hampir tercapai, meskipun ada beberapa indikator yang belum tercapai, salah satunya pembentukan kawasan perdesaan dikarenakan terkendala pandemi covid-19 dan belum adanya usulan pembentukan kawasan baru.

Gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2020











Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2021











**2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan tahun 2021 dapat dilihat tabel 2.3. pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan target indikator tercapai, ada salah satu indikator yang belum tercapai target semisal Persentase BUMDES dalam kategori berkembang, belum tercapainya indikator tersebut dikarenakan terkendala pandemi covid-19 diharapkan pada tahun berikutnya dengan indikasi pulihnya Perekonomian dan Pandemi Covid yang sudah berangsur pulih akan membawa dampak terhadap tercapainya target indikator yang belum tercapai sebelumnya.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **SPM/standar Nasional** | **IKK** | **Target Kinerja Tahun Ke-** | | | | **Realisasi** | | **Proyeksi** | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **A.** | **Indikator RPJMD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Indeks Desa Membangun (IDM) | Indeks |  |  | 0,6845 | 0,6852 | 0,6858 | 0,6937 | 0,6937 | 0,6937 | 0,6937 | 0,6937 |
| 2. | Indeks Ketahanan Sosial | Indeks |  |  | 0,7899 | 0,7909 | 0,7919 | 0,8056 | 0,8056 | 0,8056 | 0,8056 | 0,8056 |
| 3. | Indeks Ketahanan Ekonomi | Indeks |  |  | 0,6319 | 0,6329 | 0,6339 | 0,6388 | 0,6388 | 0,6388 | 0,6388 | 0,6388 |
| 4. | Indeks Ketahanan Lingkungan | Indeks |  |  | 0,6317 | 0,6317 | 0,6317 | 0,6366 | 0,6366 | 0,6366 | 0,6366 | 0,6366 |
| **B.** | **Indikator Renstra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Indikator tujuan dan Sasaran :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Persentase desa dengan kategori desa mandiri | % |  |  | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,32 | 4,32 | 4,3 | 4,3 |
| 2. | Persentase desa tertib administrasi | % |  |  | 81 | 82 | 83 | 83 | 82,1 | 82,1 | 83 | 83 |
| 3. | Persentase BUMDES dalam kategori berkembang | % |  |  | 11,4 | 14,2 | 17,1 | 17,1 | 10,53 | 10,53 | 17,1 | 17,1 |
| 4. | Persentase desa yang mempunyai keswadayaaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15% | % |  |  | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 5. | Nilai SAKIP | Score |  |  | 73 | 76 | 79 | 79 | 70,32 | 70,32 | 79 | 79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Indikator Program :** |  |  |  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan | Persen |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan | Persen |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa | Persen |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase Desa yang melakukan kerjasama | Persen |  |  | 85 | 95 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| 5. | % Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi) | Persen |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | Persen |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berbagai isu-isu strategis dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terkait dengan pelaksanaan program-program utama, yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitasi penerapan dan pemanfaatan TTG dalam masyarakat.
2. Jumlah penduduk miskin terutama di perdesaan masih cukup tinggi;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
4. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
5. Belum optimalnya fungsi kelembagaan sosial ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat
6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditandai dengan berbagai hal yaitu :
8. Belum optimalnya kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa dan belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
9. Belum optimalnya kualitas aparatur pemerintah desa;
10. Belum tertibnya pertanggungjawaban keuangan/SPJ keuangan desa;
11. Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
12. Masih perlunya pemantapan kerangka regulasi tentang pemerintahan desa;
13. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam APBDesa sebagai daya dukung pembangunan desa.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Dispermades antara lain :

* 1. Belum optimalnya pelayanan administrasi desa;
  2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
  3. Belum optimalnya SDM aparatur pemerintahan desa;
  4. Belum optimalnya penguatan kelembagaan desa;
  5. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif desa dan kelembagaan ekonomi desa;

Adapun peluang yang ada, antara lain :

Dukungan Program pembangunan dari Kementrian Desa, dan PDTT;

Terjalinnya kerjasama antar Perangkat Daerah lain dalam pembangunan Desa;

Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan;

Fasilitasi peningkatan kerjasama desa;

Meningkatnya pembangunan desa berkat dukungan dana desa dari APBN, Dukungan dana bantuan keuangan dari APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten.

**2.4.Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu angaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dapat dijelaskan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa







**2.5.Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat yang bersifat pemberdayaan diakomodir oleh Bapperlibang melalui Musrenbangcam, kemudian Dispermades akan menampung usulan yang telah masuk untuk dipelajari, ditelaah dan diusulkan sebagai kegiatan yang akan dianggarkan dalam program di tahun berikutnya.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (termasuk hasil Musrenbangcam terdapat beberapa Usulan yang ditujukan ke Dispermades Kabupaten Karanganyar, namun mendasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekarang hanya ada 4 Program yang terdiri dari :

* 1. Program Penataan Desa (1 kegiatan, 7 sub Kegiatan)
  2. Program Peningkatan Kerjasama Desa (1 kegiatan, 2 sub kegiatan)
  3. Program Admnistrasi Pemerintahan Desa (1 kegiatan, 12 sub kegiatan)
  4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1 kegiatan, 6 sub kegiatan)

Sedangkan usulan yang masuk ke Dispermades terdapat 8 usulan, dan yang sesuai urusan hanya ada 5 usulan, Adapun perincian data usulan sebagai berikut

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program/Kegiatan/usulan | Lokasi | Indikator/  Permasalahan | Besaran/  volume | Catatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa | Desa Karangbangun | Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Desa | - | Sesuai urusan |
| 2 | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa | Desa Kadipiro | Lembaga Masyarakat Desa belum mempunyai ruang tersendiri, perlu pembangunan ruang lembaga |  | Sesuai urusan |
| 3 | Peningkatan Bumdes | Desa Kwangsan | Peningkatan Kapasitas Bumdes | 150.000.000 | Sesuai urusan |
| 4 | Peningkatan Kader SDM Kader Teknis Pemberdayaan Dusun | Desa Kwangsan | Pelatihan Kader Teknis & Pemberdayaan Dusun | 20.000.000 | Sesuai urusan |
| 5 | Penanaman Modal UMKM | Desa Tlobo | Penanaman Modal UMKM | 200.000.000 | - |
| 6 | Pelestarian Budaya Lokal | Desa Kalijarak | Belum Terselenggaranya Kegiatan Bersih Desa | - | Sesuai urusan |
| 7 | Karawitan | Desa Gerdu | Kegiatan seni budaya | - | - |
| 8 | Keamanan Optimal | Desa Sewurejo | Poskamling | 100.000.000 | - |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan Pembangunan Nasional agar kesenjangan pendapatan menjadi kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulanginya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik.

Penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dispermades mempunyai peran yang penting dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan keberdayaan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.

**3.2. .Tujuan dan Sasaran Dispermades**

Tujuan merupakan penjabaran dari misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sedangkan sasaran memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan dan dapat digunakan untuk memandu perumusan indikator kinerja.

Adapun tujuan serta sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Karanganyar

| **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Utama** | **Formulasi** | **Satuan** | **Kondisi Tahun** | **Target** | | **Capaian** | | **Target** | | | **Akhir renstra** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |  |
| Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa |  | Persentase desa dengan kategori desa mandiri | Jumlah desa dengan kategori desa mandiri/ jumlah desa x 100% | % | 3 | 3 | 3,7 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Indeks Ketahanan Sosial | Hasil penilaian kementrian | indek | 0,645 | 0,646 | 0,647 | 0,7899 | 0,8019 | 0,7899 | 0,7909 | 0,7919 | 0,7919 |
| Indeks Ketahanan Ekonomi | Hasil penilaian kementrian | Indek | 0,595 | 0,596 | 0,597 | 0,6319 | 0,6423 | 0,6319 | 0,6329 | 0,6339 | 0,6339 |
| Indeks Ketahanan Lingkungan | Hasil penilaian kementrian | indek | 0,685 | 0,686 | 0,687 | 0,6389 | 0,6317 | 0,6317 | 0,6317 | 0,6317 | 0,6317 |
| Meningkatnya kualitas adminsitrasi pemerintahan desa | Persentase desa tertib administrasi | Jumlah desa dengan administrasi lengkap (buku administrasi desa, produk hukum desa, profil, monografi, APBDes,lap keu, penerapan aplikasi, data kelembagaan) / Jumlah Desa x 100% | % | 78 | 79 | 80 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
| Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat | Persentase BUMDES dalam kategori berkembang | Jumlah BUMDES dalam kategori berkembang/ Jumlah BUMDES tahun 2018 x 100% | % | 4,76 | 6,67 | 8,5 | 6,67 | 8,5 | 11,4 | 14,2 | 17,1 | 17,1 |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 % | Jumlah desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15% /jumlah desa X 100% | % | NA | 12 | 13,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16 | 18 | 18 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa | Nilai SAKIP | Evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan | Score | NA | 65 | 66 | 71,29 | 68,85 | 73 | 76 | 79 | 79 |

**3.3. Program dan Kegiatan**

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam menetapkan program dan kegiatan ada beberapa pertimbangan diantaranya :

1. Visi dan misi Bupati Karanganyar; terutama misi ke -4 yaitu mewujudkan desa sebagai pusat Pertumbuhan.
2. Tujuan dalam renstra Dispermades
3. Sasaran Dispermades
4. Pencapaian SDGs khususnya tujuan ke -10 dengan indikator ;
5. Indikator 10.1.1.(b)

* Jumlah desa tertinggal yang terentaskan (maju dan berkembang)

1. Indikator 10.1.1.(c)

* Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal

1. Indikator 10.1.1.(d)

* Jumlah Desa Mandiri

1. Indikator 10.1.1.(f)

* Persentase Penduduk Miskin di daerah tertinggal

1. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Jumlah Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 hanya ada 4 Program yang terdiri dari ( sesui urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa) :
2. Program Penataan Desa (1 kegiatan, 2 sub Kegiatan)
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa (1 kegiatan, 2 sub kegiatan)
4. Program Admnistrasi Pemerintahan Desa (1 kegiatan, 10 sub kegiatan)
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1 kegiatan, 6 sub kegiatan)

Serta 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 17.791.242.000,-

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar maka Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan untuk dilaksananakan pada tahun 2023, mendasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang sudah terdapat beberapa pertimbangan diantaranya ; mempedomani RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2023 serta Renstra Perubahan 2021-2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 Kabupaten Karanganyar

| **KODE** | | | | | **Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)** | | | | **Catatan Penting** | **Perkiraan Maju Tahun 2024 (Rp)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif** |
|  |
|  |  |  |  |  | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | **17,746,242,000** |  |  |  | **18,867,709,100** |  |
| **2** |  |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | **17,746,242,000** |  |  |  | **18,867,709,100** |  |
| **2** | **13** |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | **17,746,242,000** |  |  |  | **18,867,709,100** |  |
| **3** | **26** | **1** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Nilai SAKIP** |  | **79** | **4,746,242,000** |  |  | **79** | **5,394,209,100** |  |
| **3** | **26** | **001** | **2.01** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | **100%** | **60,000,000** |  |  | **100%** | **12,100,000** |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Karanganyar | 1 dokumen | 50,000,000 | APBD |  | - | 0 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jml Laporan | Kab. Karanganyar | 4 laporan | 10,000,000 | APBD |  | 4 lapora | 12,100,000 |  |
| **2** | **13** | **01** | **2.02** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | **100%** | **4,050,592,000** |  |  | **100%** | **4,677,894,100** |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Karanganyar | 12 bulan | 4,050,592,000 | APBD |  | 12 bulan | 4,677,894,100 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | **100%** | **30,000,000** |  |  | **100%** | **38,500,000** |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jml SDM yang dinilai angka kredit  Jml SDM yang meningkat kapasitasnya | Kab. Karanganyar | 6 orang  10 orang | 30,000,000 | APBD | 30,000,000 | 6 orang  10 orang | 38,500,000 |  |
| **2** | **13** | **01** | **2.06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | **100%** | **233,563,000** |  |  | **100%** | **256,419,300** |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya instalasi listrik dan penerangan | Kab. Karanganyar | 12 bulan | 5,000,000 | APBD |  | 12 bulan | 5,500,000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan  Perlengkapan Kantor | Jml perlengkapan kantor yg tersedia  tersedianya alat tulis kantor cukup setiap bln  Tersedianya peralatan kantor yang baik | Kab. Karanganyar | 11 unit  12 bulan  12 bulan | 70,563,000 | APBD |  | 11 unit  12 bulan  12 bulan | 77,619,300 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan | Kab. Karanganyar | 12 bulan | 15,000,000 | APBD |  | 12 bulan | 16,500,000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perpu yang baik | Kab. Karanganyar | 12 bulan | 4,000,000 | APBD |  | 12 bulan | 4,400,000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar.dalam daerah  Tersedianya makan dan minum kantor | Kab. Karanganyar | 12 bulan  12 bulan | 134,000,000 | APBD |  | 12 bulan  12 bulan | 147,400,000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip  Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Karanganyar | 1 dokumen | 5,000,000 | APBD |  | 1 dokumen | 5,000,000 |  |
| **2** | **13** | **01** | **2.08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **100%** | **149,740,000** |  |  | **100%** | **164,714,000** |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat  Menyurat | Jml surat menyurat yang tersedia | Kab. Karanganyar | 12 bulan | 4,500,000 | APBD |  | 10 jenis | 4,950,000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan litrik | Kab. Karanganyar | 12 bulan | 45,000,000 | APBD |  | 12 bulan | 49,500,000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan  Umum Kantor | tersedianya administrasi kantor yang baik  tersedianya alat kebersihan yang cukup  Tersedianya kebersihan dan keamanan kantor | Kab. Karanganyar | 12 bulan  12 bulan  12 bulan | 100,240,000 | APBD |  | 12 bulan  12 bulan  12 bulan | 110,264,000 |  |
| **2** | **13** | **01** | **2.09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | **100%** | **222,347,000** |  |  | **100%** | **244,581,700** |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan  Dinas atau Kendaraan Dinas  Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional | Kab. Karanganyar | 12 bulan | 170,000,000 | APBD |  | 12 bulan | 187,000,000 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan  Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor | Kab. Karanganyar | 12 bulan | 17,547,000 | APBD |  | 12 bulan | 19,301,700 |  |
| 2 | 13 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor  Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang baik | Kab. Karanganyar | 12 bulan  12 bulan | 34,800,000 | APBD |  | 12 bulan | 38,280,000 |  |
| **2** | **13** | **02** |  |  | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan** |  | **100%** | **225,000,000** |  |  | **100%** | **231,000,000** |  |
| **2** | **13** | **02** | **2.01** |  | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | | | **100%** | **225,000,000** |  |  | **100%** | **231,000,000** |  |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa | jumlah desa yang melakukan penataan dusun | Kab. Karanganyar | 162 desa | 75,000,000 | APBD |  | 162 desa | 121,000,000 |  |
| 2 | 13 | 02 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Sarana dan  Prasarana Desa | Jml Desa yang dibintek penyusunan RAB Kebutuhan pembangunan jalan dan inventarisasi data infrastruktur desa | Kab. Karanganyar | 162 desa | 150,000,000 | APBD |  | 162 desa | 110,000,000 |  |
| 2 | 13 | 03 |  |  | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **Persentase Desa yang melakukan kerjasama** |  | **100%** | **150,000,000** |  |  | **100%** | **220,000,000** |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 |  | **Fasilitasi Kerja Sama antar Desa** | | | **100%** | **150,000,000** |  |  | **100%** | **220,000,000** |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Kerja Sama Antar  Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Bumdesma LKD  yang terbentuk | Kab. Karanganyar | 14 Bumdesma | 75,000,000 | APBD |  | 14 Bumdesma | 82,500,000 |  |
| 2 | 13 | 03 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pembangunan  Kawasan Perdesaan | Jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi | Kab. Karanganyar | 3 kawasan Perdesaan | 75,000,000 | APBD |  | 3 kawasan Perdesaan | 137,500,000 |  |
| **2** | **13** | **04** |  |  | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**  **Persentase desa memiliki pengelolaan aset desa** |  | **100%**  **100%** | **4,639,000,000** |  |  | **100%**  **100%** | **4,970,500,000** |  |
| **2** | **13** | **04** | **2.01** |  | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | | | **100%** | **4,639,000,000** |  |  | **100%** | **4,970,500,000** |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jml Desa yang dikoordinasi penyelenggaraan pemerintahan desanya  jml desa yang di monev  Jml Petugas SID | Kab. Karanganyar | 162 desa  162 desa  78 orang | 545,000,000 | APBD |  | 1 paket | 545,000,000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Penyusunan Produk  Hukum Desa | Jumlah perda & perbup ttng penyelenggaraan pemerintahan desa yg disusun  Jumlah peserta sosialisasi produk hukum  Jumlah produk hukum desa yang tersusun | Kab. Karanganyar | 1 Produk  Hukum  178 Orang  2 Dokumen | 50,000,000 | APBD |  | 1 Produk  Hukum  178 Orang  2 Dokumen | 50,000,000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah desa yg menyesuaikan penyusunan APBDes  Jumlah peserta terlatih menggunakan aplikasi siskeudes | Kab. Karanganyar | 162 desa  162 desa | 110,000,000 | APBD |  | 162 desa  162 desa | 110,000,000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan  Keuangan Desa | Jumlah Desa terfasilitasi asistensi dana desa  Jumlah desa tertib administrasi penggunaan alokasi dana desa  Jumlah desa yg menerima bagi hasil pajak daerah & retribusi daerah | Kab. Karanganyar | 162 Desa  162 Desa  162 Desa | 3,155,000,000 | APBD |  | 162 Desa  162 Desa  162 Desa | 3,470,500,000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah kelompok UPK dan  BKAD yang difasilitasi  Terselenggaranya fasilitasi dan penguatan kelembagaan desa | Kab. Karanganyar | 15 Kelompok  32 Bumdes | 275,000,000 | APBD |  | 15 Kelompok  32 Bumdes | 275,000,000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 08 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Kab. Karanganyar | 11 laporan | 100,000,000 | APBD |  | 11 laporan | 100,000,000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jml formasi perangkat desa yang terisi, dan mengikuti pembekalan | Kab. Karanganyar | 51 formasi | 160,000,000 | APBD |  | 51 formasi | 176,000,000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyusunan Profil  Desa | Jumlah desa kelurahan yang memiliki profil desa | Kab. Karanganyar | 177 desa/kel | 50,000,000 | APBD |  | 177 desa/kel | 50,000,000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset  Desa | fasilitasi dan monitoring aset desa ( Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan aset desa) | Kab. Karanganyar | 162 desa | 174,000,000 | APBD |  | 162 desa | 174,000,000 |  |
| 2 | 13 | 04 | 2.01 | 18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti lomba ( Jumlah desa/kelurahan yang melakukan evaluasi ) | Kab. Karanganyar | 177 desa/kel | 20,000,000 | APBD |  | 177 desa/kel | 20,000,000 |  |
| **2** | **13** | **05** |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)** |  | **100%** | **8,031,000,000** |  |  | **100%** | **8,052,000,000** |  |
| **2** | **13** | **05** | **2.01** |  | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan**  **Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | **100%** | **8,031,000,000** |  |  | **100%** | **8,052,000,000** |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0.2 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jml Kader KPMD yang dibina  Jml Satgas Adat yang difasilitasi  Jumlah KPSPAM yang difasilitasi  Jumlah PLD yang difasilitasi | Kab. Karanganyar | 162 orang  3 kelompok  154 KPSPAM  42 PLD | 210,000,000 | APBD |  | 162 orang  3 kelompok  154 KPSPAM  42 PLD | 231,000,000 |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0.3 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | jumlah kader posyandu yang dibina | Kab. Karanganyar | 8795 kader posyandu | 5,511,000,000 | APBD |  | 8795 kader posyandu | 5,511,000,000 |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0.5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah pasar desa yang dibina  Jumlah UP2K PKK yang dibina | Kab. Karanganyar | 7 unit  25 kelompok | 80,000,000 | APBD |  | 7 unit  25 kelompok | 80,000,000 |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0.6 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | jumlah rintisan posyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional | Kab. Karanganyar | 12 kelompok | 70,000,000 | APBD |  | 12 kelompok | 70,000,000 |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0.7 | Fasilitasi Bulan Bhakti  Gotong Royong Masyarakat | Desa TMMD I  Desa TMMD II  Desa TMMD III  Des/kel yg melaksanakan  GRM | Kab. Karanganyar | 1 desa  1 desa  1 desa  177 desa/kel | 1,140,000,000 | APBD |  | 1 desa  1 desa  1 desa  177 desa/kel | 1,140,000,000 |  |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0.9 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jml TP PKK yang dibina | Kab. Karanganyar | 34 desa | 1,020,000,000 | APBD |  | 34 desa | 1,020,000,000 |  |

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan rencana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam periode satu tahun anggaran dan indikasi tahun anggaran berikutnya. Rencana kerja juga merupakan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan . Proses penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan seluruh komponen dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan program dan Kegiatan tahun anggaran yang akan dilaksanakan serta indikasi tahun anggaran yang akan datang.

Demi terwujudnya Karanganyar 2023 Maju dan Mantap, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dalam Tahun anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mengusulkan program kegiatan yang terfokus pada peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang selaras dengan pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan wujud keinginan dan situasi kondisi masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya.

Apabila terdapat banyak kekurangan dalam mengajukan usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kami menerima masukan dan saran yang bisa digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada tahun anggaran berikutnya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pejabat | Paraf | BUPATI KARANGANYAR,  TTD  JULIYATMONO |
| 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah |  |
| 1. Kepala BAPERLITBANG |  |
| 1. Sekretaris BAPERLITBANG |  |
| 1. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPERLITBANG |  |